

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alaydrus*, Husein A. 1980, *Langkah Strategis Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan di Luar Negeri*, Apjati, Semarang, halaman 1
- Boschard. 1980, *Pedoman Tertib Diplomatik dan Tertib Konsuler*, Jakarta, halaman 131
- F. X., Djumialdji. 2008, *Perjanjian Kerja*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 42
- Husni. 2006, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, halaman 3
- Ishaq. 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 43
- Khakim, Khakim. 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, halaman 2-3
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, halaman 157-158
- Syafei. 1998, *Strategi Meningkatkan Daya Saring SDM TKI Memasuki Era Pasar Bebas*, Cides, Jakarta, halaman 122

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 Ratifikasi Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri

Keputusan Menlu RI Nomor 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

Memorandum of Understanding antara Indonesia dengan Malaysia tentang Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia

C. Jurnal atau Artikel

Adamhar, Ferry. 2005, Permasalahan *WNI baik TKI maupun non TKI di Luar Negeri*, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional, Deplu RI, Jakarta.

Nasib Calon TKI Memprihatinkan, Suara Merdeka, 30 Desember 2004, halaman 22

Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, halaman 3.

D. Internet

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3732241.stm>, 20 Mei 2008, pukul 12.23 WIB

https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2011/05/110530_tkimalaysia, 30 Mei 2011, pukul 17.54 WIB

<https://www.kemlu.go.id/kualalumpur/berita-agenda/infopenting/bagaimana-menjadi-tki.aspx>, 1 Maret 2018, pukul 09.23 WIB

<https://www.kemlu.go.id/kualalumpur/id/layanan-publik/pelayanan-perlindungan-wni-bhi.aspx>, 2 Maret 2018, pukul 09.08 WIB

<https://nasional.kompas.com/read/2018/04/24/12050151/wapres-jk-ada-2-juta-tki-di-malaysia>, 24 April 2018, pukul 12.05 WIB

<https://www.liputan6.com/news/read/89450/herlina-diduga-tki-ilegal>, 7 November 2004, pukul 09.09 WIB